



Modul Pelatihan
Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan oleh
Pemerintah Daerah
(LOCALISE SDGs)



DAFTAR TOPIK

1. Latar Belakang Agenda Global dan Peran Pemerintah Lokal: Apa artinya melokalkan agenda pembangunan global?

2. Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia: Rencana, dan Program

3. Perencanaan Kebijakan Terpadu untuk TPB

4. Data untuk TPB

5. Membangun lingkungan untuk TPB

6. Kemitraan Multipihak untuk TPB

Sesi 7 : Kerjasama antara pihak swasta dengan pemerintah daerah

1

- *Latar Belakang Agenda Global dan Peran Pemerintah Lokal: Apa artinya melokalkan agenda pembangunan global?*

Pokok Bahasan

Sustainable Development Goals merupakan set agenda yang bersifat mendorong pembangunan global secara menyeluruh. Dengan 169 tujuan dan agenda pembangunan global berkaitan dengan agenda pembangunan lainnya seperti Paris Agreement, New Urban Agenda dan juga Adis Abbaba. Peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial semenjak pemerintah daerah merupakan ujung tombak dari pelaku pelayanan publik yang dekat dengan masyarakat. Walaupun SDGs sudah berjalan semenjak tahun 2015, implementasi SDGs secara nasional dan sub-nasional masih memiliki tantangan secara konsep dan teknis. Hal-hal tersebut terkadang menyebabkan kebingungan di level nasional ataupun sub nasional untuk mengubah SDGs dari teori menjadi praktik.

Pengetahuan dasar yang dibutuhkan :

Gambaran kerangka kerja pembangunan internasional (terlampir)

Output:

- Mengetahui kendala implementasi SDGs di daerah

Indikator pencapaian :

- Peserta memahami latar belakang agenda pembangunan global dan peran pemerintah daerah untuk SDGs
- Peserta dapat menjelaskan tantangan yang ada di dalam implementasi TPB di daerah masing-masing
- Peserta dapat melihat tantangan bersama yang ada di pemerintah daerah masing-masing untuk implementasi SDGs

Tahap Pelatihan

- Langkah 1
Fasilitator memberikan paparan mengenai SDGs dan keterkaitan SDGs dengan agenda pembangunan global lainnya menggunakan alat bantu video. (10 menit)
- Langkah 2
Papan UNDP mengenai peran pemerintah daerah untuk TPB
- Langkah 3

Fasilitator mengajak peserta untuk membagi untuk menjadi empat kelompok. Masing kelompok akan membahas tantangan implementasi yang sudah dilakukan di daerah untuk TPB sesuai dengan matrix Enabling Environment. (10 menit)

- Langkah 4
Peserta kemudian diminta untuk melakukan evaluasi implementasi program-program TPB dan mendiskusikannya dengan kelompok. (20 menit)
- Langkah 5
Salah satu ketua kelompok akan diminta untuk melakukan presentasi mengenai hasil diskusi yang telah dilakukan (10 menit)

Sumber pembelajaran :

1. *SDGs : What local government needs to know. UCLG.*
https://www.uclg.org/sites/default/files/the_sdgs_what_localgov_need_to_know_0.pdf
2. *Transitioning from MDGs to SDGs. UNDP.*
<http://www.undp.org/content/dam/undp/library/SDGs/English/Transitioning%20from%20the%20MDGs%20to%20the%20SDGs.pdf>
3. *UCLG SDGs Roadmap. UCLG.*
https://www.uclg.org/sites/default/files/roadmap_for_localizing_the_sdgs_0.pdf

Durasi	: 60 Menit
Pengisi	: UCLG ASPAC
Requirement	: Tidak ada
Aktivitas pembuka	: Video 'Apa itu SDGs?'
Aktivitas pendukung	: Diskusi mengenai implementasi dari SDGs, mengisi UCLG ASPAC SDGs Roadmap
Alat yang dibutuhkan	: Print out enabling environment
Metode pembelajaran	: Paparan dan diskusi kelompok

Pokok bahasan

Sustainable Development Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia diimplementasikan melalui kerangka kelembagaan dan hukum di tingkat nasional dan daerah, salah satu diantaranya dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang TPB. Peraturan Presiden tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah pusat untuk menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) dan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD). Peraturan Presiden juga berfungsi sebagai acuan bagi organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi TPB. Peraturan lainnya yang bekerja untuk mendukung implementasi TPB di daerah adalah peraturan KLHS RPJMD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang mendorong perencanaan dengan analisis yang sistematis dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat memperhitungkan keberlangsungan hidup generasi mendatang telah terintegrasi di dalam rencana pembangunan ataupun dokumen kebijakan, rencana dan program satu wilayah. Sesi ini akan membahas koherensi dan praktik terbaik untuk membuat kebijakan yang koherensi secara nasional.

Output

- Pendataan program prioritas dari berbagai pemerintah daerah untuk SDGs.
- SDGs Wheel

Indikator pencapaian

- Peserta dapat memahami bagaimana cara menciptakan koherensi peraturan-peraturan untuk SDGs yang berlaku secara nasional melalui praktik terbaik
- Peserta dapat menjabarkan program-program daerah yang terkait dengan SDGs
- Peserta dapat memberikan persepsi awal antara hubungan program daerah dan pencapaian SDGs

Tahap Pelatihan

- Langkah 1
Paparan mengenai implementasi kebijakan nasional untuk SDGs oleh Bappenas (10 menit)
- Langkah 2

Paparan mengenai praktik terbaik dari Provinsi Riau dalam menyusun RAD SDGs, KLHS RPJMD, RPJMD yang saling bersangkutan. (15 menit)

- Langkah 3
Q&A dan diskusi dengan para pengisi acara. (35 menit)
- Langkah 4
Fasilitator menjelaskan mengenai SDGs Wheel (5 menit)
- Langkah 5
Fasilitator memberikan print out SDGs wheel kepada peserta yang dapat diisi mengacu kepada RAD SDGs yang sudah ada ataupun RAD/RPJMD yang lalu dan peserta mempresentasikan hasilnya (55 menit)

Sumber pembelajaran :

1. *SDGs Wheel.* https://www.dropbox.com/s/47l61mtoalfqcg5/2018-05_Bangkok-TrainingSlides-ALL.pdf?dl=0

<i>Durasi</i>	: 120 menit
<i>Pengisi</i>	: Bappenas, Pemprov Riau
<i>Requirement</i>	: Draft RAD SDGs/ RAD yang lalu/RPJMD yang lalu/Draft RPJMD yang sudah ada
<i>Aktivitas pembuka</i>	: Tidak ada
<i>Aktivitas pendukung</i>	: Pengisian SDGs wheel
<i>Alat yang dibutuhkan</i>	: Print out SDGs wheel
<i>Metode pembelajaran</i>	: Paparan best practice dan pengisian SDGs wheel

3

• **Perencanaan Kebijakan Terpadu untuk TPB**

Pokok Bahasan

Tujuan-tujuan yang ada di dalam SDGs banyak yang memiliki irisan satu sama lain. Suatu program seperti program kesehatan misalnya dapat meningkatkan pendidikan masyarakat secara menyeluruh. Di lain sisi, untuk mensukseskan tujuan yang ada di dalam program kesehatan juga membutuhkan perbaikan di sisi lain seperti sanitasi air. Melalui contoh tersebut, perencanaan program-program SDGs juga perlu memiliki perencanaan yang terintegrasi dengan satu sama lain.

Pengetahuan dasar yang dibutuhkan:

- Perencanaan terpadu untuk SDGs

Output

- *Integrated Assesment* (lihat lampiran)

Indikator pencapaian

- Peserta dapat memahami adanya keterkaitan diantara tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan
- Peserta dapat mengisi integrated assesment dengan tujuan-tujuan yang terkait

Tahap Pelatihan

- *Langkah 1*
Pemaparan mengenai tugas CISDI dalam mengadvokasi perencanaan terpadu (15 menit)
- *Langkah 2*
Fasilitator menjelaskan mengenai integrated assesment kepada peserta dan membagi peserta menjadi 7 kelompok (5 menit)
- *Langkah 3*
Masing masing kelompok mengisi Integrated Assesment bersama-saa dengan co fasilitator (45 menit)
- *Langkah 4*
Salah satu kelompok mempresentasikan hasil isian integrated assesment (15 menit)

Sumber pembelajaran :

1. <https://council.science/cms/2017/05/SDGs-Guide-to-Interactions.pdf>

Durasi : 120 menit

Pengisi : CISDI, UCLG ASPAC

Requirement : Tidak ada

Aktivitas pembuka : Pengenalan mengenai CISDI

Aktivitas pendukung : Pengisian Rapid Integrated Assesment tahap 2

Alat yang dibutuhkan : Kertas plano sebanyak 7 buah, gambar mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan

Metode pembelajaran : Paparan dan aktivitas

4 { • Data untuk TPB

Pokok Bahasan

Permasalahan data tetap menjadi isu utama di dalam implementasi SDG, padahal data merupakan kunci utama dari perencanaan pembangunan yang dapat terukur dengan baik. Perencanaan yang berbasis data biasa diambil berdasarkan data nasional namun begitu TPB terkadang membutuhkan data tambahan yang tidak dimiliki secara nasional. Selain itu, beberapa pemerintah daerah juga melakukan pendataan dan analisa untuk TPB dengan bantuan SDGs center yang ada di daerah. Sesi ini bertujuan untuk memaparkan cara-cara baru dalam mengambil data dan memperkenalkan SDGs center sebagai salah satu pemangku kepentingan yang dapat memberikan analisa yang komprehensif.

Output

- Mengetahui solusi terkait pengumpulan dan akses data terkait indikator SDGs

Tahap Pembelajaran1

- Langkah 1
Paparan dari SMERU Center/ SDGs center mengenai peran penting SDGs center dalam mendampingi daerah untuk mengambil data ataupun menganalisa data SDGs.
- Langkah 2
Q&A dengan para pengisi acara (15 menit)
- Langkah 3
Diskusi mengenai tantangan dan inisiatif untuk pengambilan data untuk TPB di dalam 7 kelompok (35 menit)

Sumber Pembelajaran:-

Durasi	: 60 menit
Pengisi	: Bappenas, SMERU, Pemerintah Provinsi NTB, SDGs Center,
Requirement	: Tidak ada
Aktivitas pembuka	: Pengenalan mengenai pengisi sesi
Aktivitas pendukung	: Tidak ada
Alat yang dibutuhkan	: Tidak ada
Metode pembelajaran	: Paparan dan sesi Q&A

5

• **Membangun lingkungan untuk TPB**

Indikator pencapaian :

- Peserta dapat memahami budget tagging untuk SDGs
- Peserta dapat memahami strategi untuk membangun lingkungan yang mendukung TPB
- Peserta dapat memberikan paparan mengenai kesiapan pemerintah daerah di segi penganggaran dan pembentukan institusi untuk TPB di masing-masing daerah
- Peserta dapat memikirkan aksi dan langkah-langkah untuk mendorong kesiapan daerah untuk SDGs

Pokok Bahasan

Proses melokalkan TPB secara nasional ataupun secara sub-nasional memerlukan beberapa kondisi yang mendukung. Selain peraturan-peraturan yang mendukung secara nasional, kesiapan institusi seperti faktor politik kepemimpinan daerah, sistem penganggaran dan juga keterkaitan TPB dengan rana kerja dari aparaturnya pelaksana untuk melaksanakan TPB juga perlu diperhatikan.

Output :

- Data kesiapan daerah untuk SDGs

Tahap Pembelajaran

- Langkah 1
Papan mengenai Budget tagging untuk SDGs dari Badan kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (30 menit)
- Langkah 2
Papan mengenai UCLG ASPAC mengenai strategi membangun kesiapan pemerintah daerah (15 menit)
- Langkah 3
Q&A dengan para pembicara (10 menit)
- Langkah 4
Fasilitator utama menjelaskan sesi world cafe session dan membagi peserta menjadi 2 kelompok (kelompok 1 dan kelompok 2)
- Langkah 5

Peserta yang terbagi menjadi dua kelompok mendiskusikan pertanyaan terkait berdasarkan meja yang di dapat. Meja pertama mendiskusikan kesiapaan anggaran untuk SDGs di daerah masing-masing sedangkan meja kedua membahas kesiapan institusi untuk SDGS di daerah masing-masing. Masing masing diskusi dilakukan selama 30 menit. (30 menit)

- Langkah 6
Kelompok lalu bertukar meja ke meja lainnya dan melakukan diskusi kedua (30 menit)
- Langkah 7
Fasilitator meminta kembali salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan gagasan untuk mendorong kesiapan institusi. (20 menit)

Sumber pembelajaran :

1. *A quick reference guide for Hosting World Cafe, World Cafe Community Foundation, <http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Cafe-To-Go-Revised.pdf>*

<i>Durasi</i>	: 180 menit
<i>Pengisi</i>	: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dan INFID
<i>Requirement</i>	: Tidak ada
<i>Aktivitas pembuka</i>	: Tidak ada
<i>Aktivitas pendukung</i>	: World Cafe Session mengenai kesiapan daerah untuk SDGs
<i>Alat yang dibutuhkan</i>	: Flipchart, spidol
<i>Metode pembelajaran</i>	: Paparan dan <i>world cafe session</i>

Indikator pencapaian :

- Peserta dapat mengerti teknik-teknik kerjasama multipihak untuk SDGs
- Peserta dapat mengidentifikasi pemangku kepentingan lainnya untuk SDGs

Pokok Bahasan :

Kerjasama multipihak yang dinamis dapat mendukung pencapaian TPB dengan memberikan mekanisme pemecahan masalah yang dihadapi oleh masing-masing pihak. Walaupun membangun kemitraan terkadang merupakan sebuah urusan yang mudah, namun membangun kemitraan yang efektif untuk TPB terkadang menghadapi tantangan tersendiri ketika pihak-pihak lainnya memiliki motif dan juga ketidaksamaan prinsip di dalam perencanaan. Selain itu, Pemerintah Daerah sendiri masih memiliki tantangan yang besar dalam berkolaborasi dengan lembaga non-pemerintah dari segi pendataan pemangku kepentingan yang ada di daerah masing-masing. Oleh sebab itu, sesi ini akan membahas teknik-teknik kerjasama multipihak yang mengacu kepada MSP guideline yang disusun oleh Bappenas, INFID dan GIZ dan juga melakukan pelatihan mengenai metode pendataan pihak-pihak yang bersangkutan untuk TPB di daerah.

Output :

Stakeholder mapping masing-masing daerah

Langkah Pembelajaran

- Langkah 1
Paparan mengenai Multistakeholder Partnership Guideline dari Bappenas (10 menit)
- Langkah 2
Diskusi dan sesi tanya jawab (15 menit)
- Langkah 3
Fasilitator utama menjelaskan mengenai proses Stakeholder Mapping (5 menit)
- Langkah 4
Peserta melakukan diskusi dengan teman sebelahnya mengenai pemangku kepentingan utama untuk TPB dengan bantuan co-fasilitator (15 menit)
- Langkah 5
Fasilitator meminta perwakilan kelompok untuk memberikan presentasi mengenai pemangku kepentingan utama yang telah didiskusikan (15 menit)

- Langkah 6
Peserta diminta untuk mengisi stakeholder mapping dan institutional perception mapping secara individu (30 menit)
- Langkah 7
Fasilitator meminta beberapa pemerintah daerah untuk memberikan presentasi mengenai stakeholder mapping yang sudah dibuat (30 menit)

Sumber pembelajaran :

1. *Institutional perception mapping. World Bank.*
http://siteresources.worldbank.org/EXTTOPPSISOU/Resources/1424002-1185304794278/4026035-1185375653056/4028835-1185375938992/2_Insti_perception_mapping.pdf
2. *Stakeholder analysis toolkit. Manchester Metropolitan University.*
<https://www2.mmu.ac.uk/media/mmuacuk/content/documents/bit/Stakeholder-analysis-toolkit-v3.pdf>
3. *Tools for Institutional, Political, and Social Analysis of Policy Reform: A Sourcebook for Development Practitioner. World Bank.*
http://siteresources.worldbank.org/EXTTOPPSISOU/Resources/1424002-1185304794278/TIPs_Sourcebook_English.pdf

Durasi	: 120 menit
Pengisi	: Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional, Bappenas
Requirement	: Tidak ada
Aktivitas pembuka	: Paparan
Aktivitas pendukung	: Stakeholder mapping untuk SDGs
Alat yang dibutuhkan	: Matrix untuk stakeholder mapping
Metode pembelajaran	: Paparan dan aktivitas pengisian stakeholder mapping

7 {

• **Kerjasama antara pihak swasta dengan pemerintah daerah**

Indikator pencapaian :

- Peserta dapat memahami pendanaan alternatif yang ditawarkan oleh pihak-pihak lainnya untuk menjalankan program TPB.
- Peserta dapat memberikan tantangan yang ada di dalam kerjasama dengan pihak swasta
- Pihak swasta dapat melihat program-program prioritas yang ada di daerah

Pokok Bahasan :

Berbeda dengan Agenda Pembangunan Millenium sebelumnya, TPB menitikberatkan pendanaan TPB melalui mekanisme kekuatan fiskal daerah dan juga pendanaan sumber lain yang bukan berbasis hibah. Secara tidak langsung, pemerintah daerah sudah dapat mulai memikirkan langkah-langkah kerjasama yang dapat di dilakukan dengan pihak swasta untuk melaksanakan program TPB. Berbagai inovasi mekanisme pendanaan sudah di tawarkan seperti crowdfunding, CSR dan juga blended financing. Tapi berbagai potensi yang sudah ada seperti pendanaan melalui blended financing, crowdfunding ataupun CSR masih mengalami kendala kesadaran pemerintah daerah atas mekanisme tersebut dan kendala teknis yang ada di daerah. Sesi ini akan memberikan paparan mengenai mekanisme pendanaan dari pihak swasta untuk pemerintah daerah, kerjasama pemerintah daerah dengan BUMD daerah masing-masing dan juga mendiskusikan tantangan yang ada dalam implementasi dana CSR.

Output :

- Hasil diskusi tantangan akses dana CSR oleh pemerintah daerah
- Data kerjasama pemerintah daerah dengan BUMD di masing-masing daerah

Langkah Pembelajaran

- Langkah 1
Paparasi mengenai pendanaan alternatif oleh Filantropi (10 menit)
- Langkah 2
Paparasi mengenai program yang telah dilaksanakan bersama-sama pemerintah daerah oleh PT Holcim (10 menit)
- Langkah 3
Paparasi mengenai program yang telah dilaksanakan bersama-sama pemerintah daerah oleh PT Sinar Mas (10 menit)
- Langkah 3

Fasilitator utama membagi peserta dari pemerintah daerah menjadi tiga kelompok (diskusi mengenai persepsi pemerintah daerah mengenai CSR, diskusi mengenai program prioritas daerah dan juga diskusi mengenai kerjasama pemerintah daerah dengan BUMD)

- Langkah 4
Masing-masing grup mendiskusikan tema sesuai dengan tema kelompok yang ada (10 menit)
- Langkah 5
Masing-masing grup berpindah meja dan melakukan diskusi selanjutnya. (10 menit)
- Langkah 6
Fasilitator melakukan diskusi dengan peserta mengenai hal-hal yang telah didiskusikan (30 menit)

Sumber pembelajaran :

1. *A quick reference guide for Hosting World Cafe, World Cafe Community Foundation, <http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Cafe-To-Go-Revised.pdf>*
2. *MSP Guideline. UNU dan Bappenas (Masih bersifat Draft)*

Durasi	: 120 menit
Pengisi	: Filantropi, Baznas
Requirement	: Tidak ada
Aktivitas pembuka	: Filantropi, Baznas
Aktivitas pendukung	: World Cafe Session
Alat yang dibutuhkan	: 3 meja
Metode pembelajaran	: Paparan dan diskusi dengan world cafe session

Lampiran

1. Matrix enabling conditions for SDGs

Kondisi yang mendukung	Peringkat	Kemungkinan tantangan yang ada di pemerintah daerah anda	Langkah-langkah yang dapat mendorong perubahan
Kerangka konstitusional			
Kerangka legislatif			
Demokrasi			
Transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah			
Pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sendiri			
Pembangunan kapasitas dari masing-masing staff pemerintah daerah			
Transparansi			
Keterlibatan publik			
Kinerja pemerintah daerah			
Strategi untuk urbanisasi			
Tata kelola untuk lingkungan dan perubahan iklim			

Kapasitas pemantauan dan pelaporan			
------------------------------------	--	--	--

2. SDGs Wheel



